

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa *Arab Spring* atau sering juga disebut dengan Kebangkitan Arab adalah pergolakan masyarakat Arab atas pemerintah otoriter. Masyarakat Arab sendiri menyebut peristiwa ini sebagai *Al-Tsaurat al-Arabiyyah*, sebuah revolusi yang akan mengubah tatanan hidup masyarakat dan bangsa setelah sekian lama dipimpin dengan sistem otoriter (Sahide, 2019, hlm. 1). Dunia internasional menyebutnya dengan nama *The Arab Spring* sebab peristiwa ini dianggap menjadi titik awal perkembangan demokrasi di negara-negara Arab. Negara-negara di kawasan MENA kebanyakan memiliki bentuk pemerintahan serupa, yaitu pemerintahan otoriter. Bentuk pemerintahan otoriter ini ditandai dengan adanya seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan penuh di dalam suatu negara. Penguasaan negara oleh sekelompok individu ini tentu menimbulkan keuntungan bagi pihak yang berkuasa, sementara pihak lainnya seringkali mendapatkan kerugian. Masyarakat yang muak atas pemerintahan otoriter menginginkan sebuah perubahan menuju pemerintahan demokratis. Hal tersebut kemudian menjadi dasar dari terjadinya revolusi *Arab Spring*.

Arab Spring atau Musim Semi Arab masuk dalam kategori revolusi sebab merupakan sebuah perubahan cepat dan terjadi secara tiba-tiba. Musim Semi Arab berawal di Tunisia, negara yang tidak pernah disangka akan menjadi awal sebuah revolusi. Keterkejutan banyak pihak tersebut didasarkan pada fakta bahwa Tunisia dikenal sebagai negara yang memiliki kondisi stabil dibandingkan negara-negara tetangganya. Revolusi tersebut menyebar terlebih dahulu dari Tunisia ke Aljazair dan Mesir, negara tetangganya barulah menyebar ke kawasan MENA lainnya. Pada prosesnya diketahui bahwa revolusi *Arab Spring* ini berbeda dari revolusi yang pernah terjadi sebelumnya. Revolusi sebelumnya dianggap sebagai langkah yang harus ditempuh untuk menata ulang masyarakat yang sudah ada. Hal tersebut disebabkan anggapan bahwa revolusi dapat membuat keadaan lebih baik dan

memunculkan sebuah masa depan yang ideal. Namun, saat munculnya *Arab Spring* gagasan tentang revolusi sendiri sudah mulai memudar. Makna revolusi pada *Arab Spring* kemudian diartikan sebagai sebuah gerakan revolusioner yang memaksa pemerintah tirani dalam suatu negara untuk mereformasi diri atas nama kaum revolusioner (Bayat, 2013, hlm 597). Perubahan makna ini menunjukkan bahwa peristiwa *Arab Spring* yang muncul saat itu tidak lagi hanya dapat terwujud dengan adanya konflik kekerasan, berbeda dengan revolusi-revolusi sebelumnya.

Pada awalnya revolusi ini dikenal dengan nama *Jasmine Revolution* atau Revolusi Melati di Tunisia. Nama Revolusi Melati diberikan oleh media berdasarkan pada bunga melati yang merupakan simbol nasional negara Tunisia (Carvin, 2011). Revolusi Melati merupakan rangkaian demonstrasi masyarakat sipil terhadap pemerintahan Ben Ali, yang sudah menjabat sebagai presiden selama 23 tahun. Ben Ali yang bernama lengkap Zine El Abidine Ben Ali mendapatkan kekuasaannya setelah melakukan kudeta pada presiden sebelumnya, Habib Bourguiba. Hal tersebut seperti yang disampaikan Ben Ali kepada parlemen Tunisia pada 7 November 1987,

“...But the onset of his senility and the deterioration of this health and the medical report made on this called us to carry out our national duty and declare him totally incapable of undertaking the tasks of President of the Republic. Thereby, acting under article 57 of the Constitution, with the help of God, we take up the Presidency of the Republic and the high command of our armed forces...” (al-Bab, 2016).

Pernyataan tersebut menunjukkan ketidakmampuan Habib Bourguiba untuk menjalankan kewajibannya sebagai presiden, sekaligus mengubah posisi Ben Ali menjadi Presiden Tunisia. Kesehatan Habib Bourguiba beberapa tahun terakhir memang terus menurun dan tak jarang dirinya melakukan pengambilan keputusan yang ekstrem dan mengubahnya tak lama kemudian. Pemeriksaan oleh para dokter pada 6 November 1987 menunjukkan bahwa Habib Bourguiba sudah tidak mampu untuk menjalankan tugasnya, hal tersebut kemudian menjadi justifikasi bagi Ben Ali untuk mencopot Habib Bourguiba dari kursi kepresidenan dan menunjuk dirinya sendiri menjadi presiden baru.

Masyarakat Tunisia sendiri menyambut kudeta Ben Ali dengan harapan akan era baru setelah buruknya pemerintahan sebelumnya, terutama akibat krisis ekonomi dan finansial pada akhir masa pemerintahan Habib Bourguiba. Pada masa awal pemerintahannya, Ben Ali dihadapkan pada krisis ekonomi dalam negeri warisan pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut membuat prioritas utama Ben Ali saat pertama kali menjabat adalah mendapatkan stabilitas atas pemerintahan baru dengan melakukan berbagai reformasi dalam bidang sosial dan politik serta restrukturisasi ekonomi, sehingga dapat menarik dukungan pihak oposisi sekuler sekaligus menghindari konfrontasi dengan kelompok Islam.

Reformasi dalam bidang sosial dan politik di Tunisia tercermin dalam kebijakan-kebijakan Ben Ali yang berfokus kepada pemulihan kebebasan sipil dengan memberikan grasi kepada para tahanan politik era Bourguiba, menghapus pengadilan keamanan negara, mereformasi UU yang mengatur penahanan pra-persidangan serta meratifikasi Konvensi PBB tentang penyiksaan (Alexander, 1997, hlm 35). Kebijakan-kebijakan yang diambil Ben Ali menunjukkan pemulihan kebebasan sipil serta memunculkan suatu demokrasi sejati, jauh dari penyalahgunaan kekuasaan serta penindasan terhadap HAM yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut tentu meningkatkan popularitas Ben Ali di mata Masyarakat Tunisia, walaupun tetap terdapat pandangan miring dari beberapa pihak. Pihak-pihak yang memberikan kritik tersebut terutama merujuk perihal grasi kepada para tahanan politik era Bourguiba yang menganggap peraturan tersebut hanya menguntungkan kalangan elit Tunisia yang menentang Bourguiba saja dan merupakan kelompok Ben Ali (Derradji, 2011, hlm. 40). Secara tidak langsung pihak-pihak tersebut menyiratkan bahwa pemberian grasi hanya manuver politik Ben Ali untuk mendapatkan dukungan dari kelompok yang ditekan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Terlepas dari kritik-kritik tersebut, secara umum pemerintahan Ben Ali mendapatkan respon baik dan diterima secara luas oleh masyarakat. Namun, pada sisi lain Ben Ali masih perlu mencari cara untuk mempertahankan kekuasaannya tersebut. Sebelum masuk dalam dunia politik, Ben Ali terlebih dahulu masuk dalam

dunia militer serta institusi keamanan dalam negeri. Latar belakang tersebut membuat Ben Ali menyadari bahwa mendapat kepercayaan masyarakat menjadi sesuatu yang penting agar pemerintahannya dapat berjalan lancar. Pada awal masa pemerintahannya Ben Ali merangkul pihak militer untuk ikut dalam pemerintahannya dengan membentuk *National Security Council* (NSC) yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, menilai, serta mengevaluasi informasi mengenai kebijakan internal dan eksternal, dan merumuskan pertahanan kebijakan untuk melindungi keamanan internal serta eksternal negara (Jebnoun, 2014, hlm. 301). NSC terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Wakil Sekretaris Kementerian Dalam Negeri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata (posisi ini kemudian dihilangkan dan ditempatkan kembali pada 19 April 2011), dan Direktur Jenderal Intelijen Militer. Namun pada perjalanan pemerintahan Ben Ali di Tunisia, NSC Tidak memiliki tanggung jawab substantial dalam menetapkan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan tugasnya. Beberapa pihak berpendapat bahwa pendirian NSC dilakukan oleh Ben Ali hanya sekedar untuk mengatasi masalah keamanan dalam negeri yang muncul serta sebagai langkah mempertahankan kekuasaan pemerintahannya yang masih baru.

Latar belakang Ben Ali dalam dunia militer mempengaruhi pandangan dan aspirasi politiknya selama memerintah. Berbanding terbalik dengan negara-negara di kawasan MENA lainnya, pihak militer tidak pernah memiliki peran penting dalam pemerintahan di Tunisia (Lutterbeck, 2015, hlm. 3). Walaupun berasal dari militer Ben Ali tak lantas menjadikannya sebagai tulang punggung dalam memonopoli kekuasaan dan mengendalikan berbagai kebijakan utama. Ben Ali mengikuti jejak Habib Bourguiba dengan melakukan marjinalisasi terhadap pihak militer. Ben Ali bahkan nantinya menggunakan berbagai tindakan represif untuk menyampaikan pesan kepada lembaga militer bahwa pemerintahannya tidak akan mentolerir anggotanya yang mungkin mempertanyakan dan menentang keputusannya (Jebnoun, 2014, hlm. 301). Kekuasaan Ben Ali sendiri terpusat pada pihak keamanan dalam negeri sejak awal memerintah, bahkan dirinya melakukan kudeta terhadap Habib Bourguiba dengan bantuan pihak keamanan dalam negeri

Tunisia. Dapat dikatakan bahwa kudeta yang dilakukan oleh Ben Ali tersebut merupakan sebuah kudeta polisi, berbeda dengan mayoritas kudeta yang seringkali terjadi melalui pihak militer.

Kedekatan Ben Ali terhadap pihak polisi disebabkan dirinya pernah menduduki beberapa jabatan strategis dalam institusi keamanan dalam negeri, berbanding terbalik dengan di militer dimana dirinya tidak pernah menduduki satupun jabatan penting. Pengalaman tersebut juga membuat Ben Ali menyadari bahwa mendapatkan dukungan dari kelompok mayoritas menjadi sesuatu yang krusial, namun pada sisi lain Ben Ali tidak menginginkan kelompok Islam sebagai mayoritas yang memiliki pengaruh besar di Tunisia. Hal tersebut membuat dirinya berusaha menarik dukungan dari kelompok oposisi sekuler dengan memperlihatkan pelaksanaan demokrasi yang liberal. Tujuan Ben Ali dapat dikatakan berhasil terlihat dari mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat Tunisia terhadap pemerintahan baru, hal tersebut tidak lain sebab Presiden Ben Ali mengawali kepemimpinannya dengan harapan atas demokrasi yang tidak didapatkan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Pembebasan para tahanan politik pada masa awal pemerintahan Presiden Ben Ali mendapat sambutan positif dari kelompok Islam, sementara pihak lainnya menganggap hal tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan atas pemerintahannya. Perlu diketahui bahwa Tunisia adalah negara sekuler sejak kemerdekaan tetapi Islam merupakan golongan mayoritas di negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan kelompok Islam tentu dapat membantu Pemerintahan Ben Ali yang masih baru. Reformasi sosial dan politik di Tunisia tidak hanya menguntungkan kelompok Islam semata tetapi juga dirasakan oleh golongan sekular. Dalam Anderson (1991, hlm. 251) Ben Ali mengatakan akan berkomitmen dalam menghormati HAM serta hukum yang berlaku dengan mengakhiri jabatan presiden seumur hidup, menjamin kebebasan pers serta hak untuk mengekspresikan opini pribadi. Dirinya juga melakukan transisi dari *one state party* menjadi multi-partai untuk membuat demokrasi yang lebih pluralis.

Ben Ali menunjukkan komitmen untuk menepati janji-janji tersebut dengan membuat *Tunisian National Pact of 1988* melalui negosiasi antara berbagai

kelompok dan disetujui oleh perwakilan dari enam partai politik, beberapa partai kecil, organisasi masyarakat sampai kelompok Islam. Dalam pakta tersebut disebutkan bahwa pihak oposisi diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sekaligus dibebaskan dalam memiliki pandangan yang berbeda dari kalangan mayoritas maupun pemerintahan, diskusi politik yang lebih inklusif juga akan dilaksanakan untuk mengakomodasi berbagai pandangan yang berbeda tersebut. Walaupun *Tunisian National Pact of 1988* dianggap bukan perwujudan demokrasi sejati tetapi pihak oposisi melihat ini sebagai awal yang cukup baik bagi penegakan demokrasi di negara dengan pemerintahan otoriter sebelumnya, berbagai perubahan yang ada telah mengakomodir hal-hal yang mereka suarakan selama ini serta menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penegakan demokrasi sebenarnya. Sejak saat itu dapat dikatakan bahwa Ben Ali berhasil mendapatkan dukungan dari pihak oposisi, keberhasilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan dirinya memahami keadaan dalam negeri.

Reputasi Pemerintahan Ben Ali juga meningkat di kalangan oposisi, terutama Kelompok Islam. Kelompok Islam melihat pergantian pemerintahan di Tunisia sebagai momentum untuk masuk dalam dunia politik, Presiden Ben Ali sendiri bahkan mengimplementasikan sistem multi partai yang lebih efektif. Ben Ali tetap mempertahankan bentuk negara sekuler yang memperbolehkan adanya multi partai dengan syarat tidak boleh didirikan atas dasar nilai-nilai suatu agama dan suku (Sofi, 2018, hlm. 41). MIT kemudian mengubah nama mereka menjadi Ennahda (*The Renaissance Party*) dengan tujuan untuk melegalkan organisasi tersebut menjadi partai politik resmi. Namun pemerintahan Ben Ali menolak pengajuan pelegalan Ennahda untuk menjadi partai resmi hingga beberapa kali, akan tetapi anggota Ennahda tetap diperbolehkan untuk mengikuti pemilu 1989 dalam kategori individu. Nantinya Pemilu 1989 akan menjadi pemilu pertama sekaligus terakhir yang demokratis pada masa Presiden Ben Ali berkuasa.

Pemilu 1989 dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen serta presiden baru Tunisia. RCD yang merupakan partai pengusung Ben Ali memenangkan tempat pertama sekaligus mendapatkan semua kursi di parlemen, hal tersebut karena Undang-Undang Pemilu Tunisia dibuat untuk mencegah adanya

representasi dari partai minoritas (Anderson, 1991, hlm. 258). Sementara Partai Islam Ennahda mendapatkan tempat kedua dan menjadikannya pihak oposisi terbesar bagi pemerintah. Kemenangan Ennahda dalam pemilu 1989 menunjukkan besarnya kelompok Islam di Tunisia meskipun hanya masuk dalam kategori individu. Kemunculan Ennahda sebagai pihak oposisi menjadi ancaman langsung bagi Ben Ali yang memenangkan jabatan sebagai Presiden Tunisia selama lima tahun ke depan. Setelah memenangkan pemilu 1989 tujuan utama Ben Ali adalah untuk mempertahankan keberlangsungan rezimnya di Tunisia.

Perkembangan demokrasi yang diharapkan pada pemerintahan baru ini malah berbalik akibat keberadaan kelompok Islam yang dianggap mengancam. Wajah otoriter Pemerintahan Ben Ali mulai terlihat dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan represif, langkah yang tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Ben Ali bahkan melakukan pemisahan ketat antara politik serta agama selama masa kekuasaannya, menjadikan Tunisia sebagai negara yang sangat sekuler. Setelah pemilu 1989, reformasi dalam bidang politik berjalan dengan lambat. Ben Ali mulai menekan pihak oposisi dengan cara membatasi serta mengawasi semua pergerakan mereka. Janji-janji yang diberikan oleh Ben Ali pada awal pemerintahannya untuk memperbaiki konsensus nasional yang tidak dijalankan semasa era pemerintahan Bourguiba seperti, menghentikan jabatan presiden seumur hidup, memperkenalkan sistem multi-partai, membebaskan para tahanan politik yang dipenjara pada rezim sebelumnya dan memperbolehkan aktivis Islam ikut dalam pemilu tidak lagi dilaksanakan.

Hasil pemilu 1989 membuat Ben Ali mengambil langkah yang sama dengan presiden sebelumnya dengan menangkap serta membuang para aktivis Islam ke luar negeri, termasuk Ghannouchi. Para aktivis Islam Tunisia yang awalnya melihat perpindahan rezim di Tunisia sebagai angin segar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam politik, pada akhirnya sadar bahwa Ben Ali tidak berniat memberikan hal tersebut. Nantinya bahkan Ben Ali menginginkan pemisahan ketat antara politik serta agama. Tunisia kemudian menjadi negara yang sangat sekuler di bawah pemerintahan Ben Ali, bahkan lebih daripada masa pemerintahan Habib Bourguiba.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menjadi tertarik dan memilih mengkaji mengenai Revolusi Melati di Tunisia. Topik Revolusi Melati dipilih sebab merupakan gerbang awal dari peristiwa *Arab Spring* yang merupakan salah satu revolusi di abad-21 dan masih jarang dibahas, padahal banyak fakta-fakta menarik dalam revolusi ini. Beberapa fakta menarik yang peneliti dapatkan tentang revolusi ini adalah tentang, keterkejutan berbagai pihak terhadap Tunisia sebagai negara awal terjadinya revolusi, dalam kurun waktu satu bulan demonstrasi masyarakat dapat menurunkan Ben Ali yang telah menjadi presiden Tunisia selama 23 tahun, sampai keberhasilan Tunisia mulai menjadi negara demokratis ditunjukkan dengan dikeluarkannya konstitusi baru pada tahun 2014. Selain itu, dari semua negara tempat berkobarnya *Arab Spring*, Tunisia menjadi satu-satunya negara yang berhasil mendapatkan demokrasi. Hal-hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan yang menjadi landasan penelitian ini dilakukan yaitu, bagaimana kondisi ekonomi di Tunisia pada masa Pemerintahan Ben Ali, saat terjadinya Revolusi Melati dan setelah berakhirnya revolusi?

Dari landasan penelitian tersebut peneliti akan mengkaji lebih jauh mengenai peristiwa ini dan kemudian diberikan judul, *Dampak Revolusi Melati di Tunisia bagi Kehidupan Ekonomi Tahun 2014-2021*. Dari judul tersebut kemudian dibuat rumusan masalah yang dapat menjelaskan peristiwa Revolusi Melati di Tunisia secara rinci. Pemilihan angka tahun 2014 sebagai titik awal penelitian merujuk kepada awal digunakannya Konstitusi Tunisia 2014 yang merupakan konstitusi baru Tunisia. Penggunaan konstitusi baru di Tunisia merubah berbagai sektor kehidupan masyarakat dan berpengaruh pula dengan keadaan ekonomi dalam negeri. Adapun penggunaan tahun 2021 sebagai batas akhir penelitian dikarenakan pada tahun tersebut, Presiden Kais Saied mengumumkan pembekuan terhadap parlemen. Peneliti beranggapan bahwa pembekuan parlemen oleh presiden merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi Tunisia 2014 dan menunjukkan bahwa demokrasi yang berjalan di Tunisia masih sangat rapuh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya kemudian dibuat beberapa pertanyaan penelitian. Tujuan dibuatnya pertanyaan penelitian adalah untuk menjelaskan tentang “Dampak Revolusi Melati di Tunisia bagi Kehidupan Ekonomi Tahun 2014-2021” secara rinci sesuai dengan kronologi waktu yang menjadi ciri khas penelitian sejarah. Pertanyaan penelitian kemudian dibuat untuk mempermudah peneliti mengarahkan sekaligus membatasi permasalahan yang akan dibahas. Pertanyaan penelitian tersebut kemudian dibuat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kebijakan pemerintahan Ben Ali berpengaruh pada perkembangan ekonomi di Tunisia (1990-2010)?
2. Bagaimana kehidupan ekonomi Tunisia pada saat Revolusi Melati berlangsung (2010-2014)?
3. Bagaimana dampak ekonomi dari Revolusi Melati di Tunisia (2014-2021)?

1.3 Tujuan Penelitian

Seperti yang tercantum dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI (Universitas Pendidikan Indonesia, 2019, hlm. 22) bahwa tujuan penelitian sendiri berhubungan erat dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian sendiri terdiri dari tujuan umum serta khusus, hal ini untuk memperlihatkan secara jelas sejauh mana cakupan materi yang akan diteliti. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memaparkan tentang dampak ekonomi Revolusi Melati yang terjadi di Tunisia dari tahun 2014 - 2021. Sementara untuk tujuan khusus sendiri seperti yang telah dirumuskan peneliti dalam rumusan masalah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memaparkan berbagai kebijakan pada masa Pemerintahan Ben Ali yang mempengaruhi kondisi ekonomi Tunisia dari tahun 1990 sampai 2010.
2. Mendeskripsikan pengaruh terjadinya Revolusi Melati di Tunisia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat pada tahun 2010 sampai 2014.

3. Menganalisis dampak terjadinya Revolusi Melati dalam bidang ekonomi di Tunisia, dengan membandingkan perekonomian Tunisia pada saat berlangsungnya serta setelah terjadi revolusi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sendiri adalah hasil yang ingin diraih setelah melakukan sebuah penelitian. Peneliti akan menunjukkan manfaat yang diberikan dari penelitian ini dalam segi teoritis, sebab penelitian ini ditunjukkan untuk mengkaji masalah yang belum atau kurang diteliti sebelumnya serta segi praktis, menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat berguna sebagai alternatif sudut pandang terutama dalam bidang pendidikan. Sesuai dengan pengertian tersebut, adapun manfaat yang ingin peneliti peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan belajar dan rujukan dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan Kelas XII KD 4.6 mengenai, konflik-konflik Timur-Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, Eropa, Afrika dan Amerika Latin. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai konflik-konflik yang terjadi di Afrika, terutama mengenai Revolusi Melati.
2. Memberikan gambaran baru mengenai kondisi ekonomi di Tunisia mulai dari masa pemerintahan Ben Ali, awal muncul Revolusi Melati, pemerintahan transisi, sampai dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Tunisia setelahnya. Sehingga nantinya penelitian ini dapat memperkaya penulisan sejarah kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.
3. Menambah wawasan baru tentang revolusi di Tunisia, khususnya bagi peneliti dan untuk pembaca pada umumnya. Sehingga di kemudian hari dapat menjadi referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peristiwa Revolusi Melati.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan yang akan dipaparkan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan berisi latar belakang permasalahan serta alasan peneliti memilih melakukan penelitian seputar topik “Dampak Revolusi Melati di Tunisia bagi Kehidupan Ekonomi Tahun 2014-2021”. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut dibuat sebuah rumusan masalah yang berfungsi membatasi permasalahan sehingga pembahasan yang akan diuraikan menjadi fokus serta tidak melebar. Selanjutnya, akan dijelaskan harapan yang ingin diraih peneliti melalui pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan pada rumusan masalah sebelumnya dalam tujuan penelitian. Kemudian, terdapat pula manfaat penelitian yang berisi kegunaan yang dapat diberikan oleh penelitian ini. Terakhir terdapat struktur organisasi skripsi yang menjadi pedoman peneliti dalam melakukan penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai sumber-sumber literatur yang dipakai peneliti untuk melakukan penelitian berupa penelitian terdahulu, buku, artikel jurnal, serta sumber lain yang dianggap relevan dengan topik pembahasan. Sebagai dasar untuk menjelaskan lebih lanjut hasil temuan mengenai topik penelitian akan digunakan beberapa konsep dan teori yang berhubungan dengan penelitian. Penggunaan konsep dan teori sendiri adalah untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis pada penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Adapun peneliti sendiri menggunakan metode penelitian sejarah dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian sejarah dianggap metode paling tepat untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Metode penelitian sejarah sendiri terdiri dari pengumpulan sumber, verifikasi sumber, interpretasi serta historiografi.

Bab IV Pembahasan, bab ini akan berisikan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab I. Nantinya akan dipaparkan tentang kebijakan-kebijakan yang memiliki pengaruh pada kehidupan ekonomi di Tunisia dan akhirnya menjadi faktor pendorong munculnya revolusi di Tunisia di tahun 2010. Selain itu, akan

dipaparkan juga kondisi ekonomi saat berlangsungnya revolusi di Tunisia dari tahun 2010-2014. Dimulai dari awal munculnya revolusi, kejatuhan Ben Ali sampai dikeluarkannya konstitusi baru di Tunisia. Dijelaskan pula dampak dari peristiwa Revolusi Melati terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Tunisia. Jawaban tersebut berasal dari berbagai sumber yang sebelumnya telah dikaji lalu dianalisis serta dikaitkan dengan konsep serta teori yang telah dibahas oleh peneliti dalam Bab II.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, bab ini berisi tentang jawaban pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah Bab I, yang telah didapatkan dari pembahasan dalam Bab IV sebelumnya. Terdapat pula rekomendasi yang mencakup saran untuk mata perkuliahan terkait, pembelajaran sejarah di sekolah dan pihak yang berminat melakukan penelitian selanjutnya sesuai dengan topik bahasan dari penelitian ini. Bab ini juga sekaligus menjadi bab terakhir dalam penulisan skripsi.

